

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok sudah dimulai secara resmi sejak tahun 1950 dan menjadi titik awal bagi banyak kerja sama antara kedua negara. Di tahun 2005 Indonesia dan Tiongkok menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis yang termasuk kerja sama di bidang keamanan, politik, kebudayaan, sosial, dan ekonomi.¹ Keberhasilan Deklarasi ini membawa kedua negara pada pola kerja sama baru, di tahun 2013 terbentuklah Kemitraan Strategis Komprehensif yang berupa hubungan bilateral kompleks yang lebih berfokus pada sektor ekonomi dan pembangunan. Di sektor ekonomi, pembahasan utama pada hubungan ini meliputi perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur.² Dalam proses kerja sama ini pembangunan infrastruktur di Indonesia hasil kerja sama kedua pihak semakin pesat perkembangannya.³

Salah satu sektor kerja sama Tiongkok ke Indonesia meliputi sektor ekonomi dan investasi. Di tahun 2013 Presiden Xi Jinping juga memperkenalkan gagasannya yaitu *Belt Road Initiative* (BRI), inisiasi ini muncul sebagai wujud

¹ Michella Desri Viollita, "Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan Cina Tahun 2005-2011.," n.d.

² Gatra Priyandita, "Global : Jurnal Politik Internasional From Rivals to Partners : Constructing the Sino-Indonesian Strategic Partnership" 21, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.7454/global.v21i1.361>.

³ Arif Rahman Majid and Mohammad Latief, "Indonesia – China Bilateral Cooperations: Impact of CSP (Comprehensive Strategic Partnership) Toward Infrastructure Development Under Joko Widodo's Era," *Mediasi: Journal of International Relation* 2, no. 1 (2019): 1–18.

dari keinginan Tiongkok untuk menciptakan konektivitas antar negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan menggabungkan kerja sama di berbagai sektor. Inisiasi ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan transportasi negara-negara yang dilewati oleh peta perdagangan Tiongkok.

Dalam skema BRI di Indonesia, Tiongkok akan fokus berinvestasi pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Salah satu pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan hasil dari pendanaan investasi langsung dari Tiongkok adalah pembangunan transportasi kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.⁴ Dalam rangkaian investasinya, Tiongkok memberikan investasi pada pembangunan di sektor infrastruktur yaitu transportasi yang mendukung keberlanjutan di Indonesia melalui skema kerja *sama Business to Business* antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kolaborasi BUMN Indonesia melalui PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan kolaborasi perusahaan Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang memegang proyek strategis nasional Indonesia berupa pembangunan transportasi yang mendukung keberlanjutan.⁵

Pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan menjadi kebutuhan Indonesia untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah demi

⁴ Gerri Prakoso Octorifadli, "Kepentingan Tiongkok Terhadap Indonesia Melalui Belt and Road Initiative Dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta- Bandung Periode 2015 – 2020," 2020.

⁵ "Profil KCIC : Connecting, Sharing Growth," accessed March 2, 2025, <https://kic.co.id/tentang-kami/profil/>.

menyediakan kesempatan yang sama dan merata bagi setiap wilayah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI) memainkan peran kebijakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kebutuhan besar akan pendanaan dan teknologi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia sudah sadar akan pentingnya memiliki infrastruktur yang memadai dan mendukung keberlanjutan, terlihat pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia mulai secara besar-besaran melakukan pembangunan infrastruktur.⁶ Kesadaran ini juga yang mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesinambungan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi akan semakin menguat beriringan dengan infrastruktur yang mendukung, barang dan jasa juga dapat di distribusikan secara lebih efektif.⁷ Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang berupa pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendukung keberlanjutan.⁸ United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah pembangunan infrastruktur

⁶ Hafi Amarta Afroni Rohim, "Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," 2024, [pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia](#).

⁷ Intan Suswita, Darwin Damanik, and Pawan Darasa Panjaitan, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun Oleh : Berdasarkan Tabel Diatas , Pertumbuhan" 2, no. 1 (2020).

⁸ Fauziah Zen and Wempi Saputra, "Chapter 8 Enhancing Climate-Resilient Infrastructure Development in Indonesia" 1 (2023).

yang direncanakan, dibangun, dan dijalankan demi meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada, dengan tetap mengurangi emisi karbon dan mengedepankan manfaat sosial dan ekonomi serta terus menjaga lingkungan.⁹ Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berprinsip memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Arah kebijakan pemerintah Indonesia terus berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ditegaskan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹⁰ Dalam UU No.11 tahun 2020 Cipta Kerja pada paragraf 3 yang membahas perizinan berusaha mulai dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan yang berbasis risiko, pada pasal 1 yang membahas keseimbangan lapangan kerja dan peningkatan investasi yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana atau program serta pengelolaan sumber daya alam yang harus dipastikan dilakukan secara bertanggung jawab dan menjamin keberlanjutan.¹¹ Selanjutnya diperkuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung

⁹ UNEP, "Sustainable Infrastructure Investment," n.d., <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/sustainable-infrastructure-investment>.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 (Indonesia, issued 2019), https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Perpres-Nomor-59-Tahun-2017-ttg-Pelaksanaan-Pencapaian-TPB_SDGs-1.pdf

¹¹ Perpres Nomor 18 Tahun 2020, "Lampiran II tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project)," 2024.

pertumbuhan ekonomi hijau.¹² Namun, pendanaan proyek pembangunan di sektor infrastruktur yang mendukung keberlanjutan masih belum bisa diatasi secara internal, yaitu dengan mengandalkan Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN). Demi mencapai pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Pemerintah Indonesia sudah mulai membuka diri pada peluang investasi asing langsung *atau Foreign Direct Investment*. Di arah kebijakan Indonesia yang terus membuka diri terhadap investasi asing, gagasan kerja sama Tiongkok melalui *Belt Road Initiative* disambut dengan baik. Kekuatan besar yang dimiliki Tiongkok sendiri terlihat pada angka investasi langsung asal Tiongkok yang masuk ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.¹³

Tabel 1. 1 Realisasi Investasi Asing Tiongkok di Indonesia

NO.	Tahun	Nilai Investasi Asing
1.	2019	\$4.744.508,6
2.	2020	\$4.842.405,8
3.	2021	\$3.160.380,1
4.	2022	\$8.226.035,1
5.	2023	\$7.438.379,1

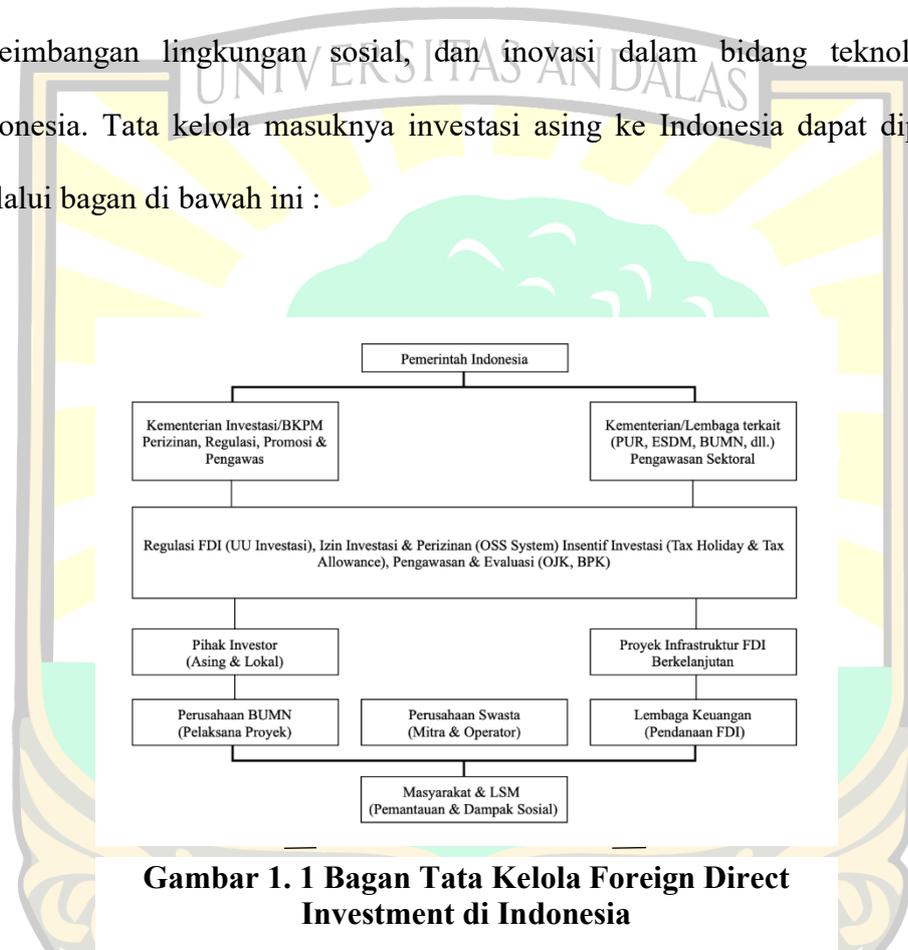
Sumber : Data diolah dari laporan Realisasi Investasi Asing BKPM 2010-September 2024 (2024)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) *melaporkan Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke Indonesia sepanjang 2019-2023 terus berdinamika. Besaran nilai investasi yang masuk dari Tiongkok diharapkan dapat

¹² Kementerian PPN/Bapenas, “Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, 2019, 257.

¹³ Said Rivaldi Assagaf et al., “Ilomata International Journal of Social Science” 4, no. 3 (2023): 508–17.

menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan investasi asing dari Tiongkok untuk menarik lebih banyak investasi asing di bidang pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan di Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi, keseimbangan lingkungan sosial, dan inovasi dalam bidang teknologi di Indonesia. Tata kelola masuknya investasi asing ke Indonesia dapat dipahami melalui bagan di bawah ini :



Gambar 1. 1 Bagan Tata Kelola Foreign Direct Investment di Indonesia

Sumber:Laman Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), Laman Kementerian PUPR: Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, dan Laman OJK. Data diolah menggunakan aplikasi pengolahan gambar Canva untuk membentuk bagan tata kelola *foreign direct investment* di Indonesia.

Pada bagan di atas dijelaskan peran yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam masuknya FDI di Indonesia. Peranan utama dimiliki oleh Pemerintah Indonesia selaku regulator yang diikuti dengan lembaga- lembaga terkait. Pengelolaan FDI diampu oleh Kementerian Investasi dapat melalui Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagai lembaga yang mengurus perizinan, regulasi, promosi, dan pengawasan. Di berbagai sektor termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan juga diampu oleh lembaga atau Kementerian terkait seperti PUPR, ESDM, BUMN, dan lainnya yang berperan sebagai pengawas sektoral. Regulasi FDI yang memuat tentang izin investasi, perizinan, insentif investasi, pengawasan, dan evaluasi oleh badan keuangan juga harus mampu menghimpun pihak investor asing maupun lokal untuk turut mematuhi peraturan yang ada. Regulasi FDI juga harus mampu mengarahkan FDI yang masuk ke sektor prioritas. Perusahaan BUMN yang biasanya berperan selaku pelaksana proyek bekerja sama dengan perusahaan swasta yang berperan sebagai mitra dan operator dalam menjalankan proyek dan juga diikuti oleh lembaga keuangan selaku sumber pendanaan dari FDI dalam melaksanakan proyek. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga ikut serta dalam memantau dan meninjau dampak sosial yang dapat dihasilkan dari proyek yang dilakukan dengan memanfaatkan FDI tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu sumber pendanaan yang dapat membantu melancarkan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah melalui Foreign Direct Investment (FDI) hal ini membuka peluang masuknya investasi asing ke Indonesia. Di antara FDI yang masuk ke Indonesia, pendanaan dari Tiongkok menjadi yang terbesar di Indonesia apabila dikelola dengan baik berpotensi membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Indonesia membutuhkan infrastruktur untuk mempercepat laju

pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan pembangunan di yang mendukung keberlanjutan. FDI yang telah masuk sebelumnya kebanyakan hanya memberikan manfaat langsung. Namun manfaat langsung tidak dapat menjamin keberlanjutan di suatu daerah apabila proyek sudah selesai. Dalam penelitian in juga akan melihat bagaimana kebijakan yang mengarahkan pengelolaan FDI di Indonesia khususnya di proyek transportasi yang mendukung keberlanjutan dapat memberikan manfaat struktural sehingga meskipun proyek pembangunan sudah selesai manfaat yang diberikan dapat terus berlanjut. Dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai pembangunan infrastruktur berupa transportasi yang mendukung keberlanjutan dengan mengelola Foreign Direct Investment dari Tiongkok sebagai salah satu sumber pendanaan agar memberikan manfaat struktural.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjabaran mengenai rumusan masalah dan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, yaitu “Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencapai manfaat struktural dalam mengelola dari FDI Tiongkok di sektor pembangunan transportasi yang mendukung keberlanjutan di Indonesia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang memadai seiring dengan agenda Sustainable Development Goals yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur khususnya transportasi yang mendukung

keberlanjutan secara global dengan memanfaatkan Foreign Direct Investment dari Tiongkok sebagai salah satu sumber pendanaannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan di ilmu Hubungan Internasional terkait kajian ekonomi politik global dengan bahasan mengenai *FDI and development*, pembangunan infrastruktur di sektor infrastruktur yang mendukung keberlanjutan, dampak jangka panjang, tantangan politik, serta keberlanjutan proyek hasil investasi asing dan kebijakan pemerintah dalam mengelola manfaat struktural dari *Foreign Direct Investment*. Khususnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola investasi asing dari Tiongkok.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan atau arah suatu kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang mendukung keberlanjutan dengan memanfaatkan *Foreign Direct Investment* dari Tiongkok. Bagi akademisi kebijakan ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan yang pengelolaan investasi asing yang memaksimalkan manfaat dari investasi asing yang masuk. *Bagi Multinational Cooperation*

yang biasanya berperan sebagai investor penelitian ini dapat bermanfaat praktis sebagai langkah awal dalam memilih wilayah yang akan di alirkan FDI melihat dari kesiapan kebijakan negara *host country*.

1.6 Studi Pustaka

Artikel karya Darwin Trisna, Andre Permana, dan M. Halley Yudhistira yang berjudul "The Challenges of Infrastructure Development in Indonesia (2023)" ini membahas tentang adanya kesenjangan infrastruktur yang ada, keterbatasan infrastruktur ini mengakibatkan lambatnya laju distribusi barang dan jasa. Serta menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menjadi salah satu penyebab kurangnya daya saing produk Indonesia di dunia Internasional. Dalam tulisan ini juga dibahas bahwa APBN sebagai sumber pendanaan utama sangat terbatas yang akhirnya mendorong masuknya sumber pendanaan eksternal termasuk FDI di dalamnya. Pemerintah Indonesia sendiri dijelaskan sangat bergantung pada investasi asing dalam pendanaan berbagai proyek yang membutuhkan dukungan yang besar. Dijelaskan juga regulasi dan birokrasi di Indonesia menjadi salah satu penghambat masuknya investasi asing. Selain itu banyaknya risiko yang ada saat berjalannya proyek seperti keterlambatan, peningkatan biaya sering kali dialami di berbagai proyek besar di Indonesia sehingga menjadi salah satu penghambat investasi asing yang masuk. Perlunya perencanaan jangka panjang yang lebih matang pada setiap proyek diharapkan dapat dilakukan agar mengurangi risiko dan memberikan peningkatan terhadap tingkat keberhasilan proyek. Di bahan bacaan ini juga menyebutkan

peran swasta yang diharapkan dapat berkontribusi besar pada proyek pembangunan Infrastruktur di Indonesia karena pendanaan dari pemerintah yang dianggap sangat terbatas.¹⁴

Artikel selanjutnya yang berjudul “Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019” ditulis oleh Mahadiansar, Ramdhani, Eki, dan Fitri yang membahas mengenai realitas yang menyangkut investasi asing langsung atau (FDI) yang ada di Indonesia. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai pentingnya Investasi Asing Langsung terhadap kemajuan ekonomi Indonesia dengan berdasar pada kondisi FDI yang masuk ke Indonesia per tahun 2019. Dalam penelitiannya penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan menganalisis berbagai literatur yang artinya mengandalkan data sekunder sebagai sumber penelitian. Dalam tulisan ini juga dijelaskan mengenai peranan yang dimiliki oleh sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama dalam membantu mengatasi kendala anggaran yang dialami oleh pemerintah. Artikel ini menekankan pentingnya badan pengawas independen untuk mengawasi FDI terutama di kawasan yang memiliki potensi investasi, di artikel ini juga menyediakan data dan statistik masuknya FDI ke kota mana saja dan di sektor mana saja. Di dapati bahwa Pada tahun 2019, total realisasi FDI mencapai Rp 423,1 triliun, yang hanya 87,5% dari target dengan Singapura sebagai salah satu negara pemberi FDI terbesar di Indonesia. Dan di akhir jurnal

¹⁴ Darwin Trisna Djajawinata, Andre Permana, and M Halley Yudhistira, “Chapter 3 The Challenges of Infrastructure Development in Indonesia,” vol. 1, 2023, 53–78.

ini juga menyebutkan tentang hambatan investasi di Indonesia adalah infrastruktur yang kurang memadai, jurnal diakhiri dengan saran terhadap peningkatan kebijakan perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan investasi oleh pemerintah Indonesia demi menarik investasi asing yang lebih banyak di Indonesia.¹⁵

Artikel ketiga berjudul "Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" yang ditulis oleh Angelica Maharani Putri membahas kontribusi bantuan luar negeri Jepang terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi peran Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam mendanai proyek kebijakan seperti transportasi publik, energi terbarukan, dan pengelolaan air bersih yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, Jepang tidak hanya menyediakan pendanaan, tetapi juga transfer teknologi dan keahlian, sehingga proyek-proyek ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan konektivitas, dan pengurangan emisi karbon. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara bantuan luar negeri dan kebijakan nasional untuk memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Mahadiansar Mahadiansar et al., "Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019," *Matra Pembaruan* 5, no. 1 (2021): 65–75, <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.65-75>.

¹⁶ Angelica Maharani Putri, "Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan : Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" 1, no. 2 (2024): 85–102.

Artikel keempat berjudul “Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam kerja Sama Indonesia-Tiongkok 2010-2018” karya Adis Zakiya dan Chandra Purnama yang dimuat dalam *Padjajaran Journal of International Relations* (PADJIR). Artikel ini menyebutkan infrastruktur sebagai permasalahan yang dimiliki oleh Indonesia sejak tahun 1990an. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa Tiongkok di pandang sebagai pihak yang memiliki potensi untuk diajak bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di penelitian ini menggunakan tiga platform kerja sama di antara kedua negara yaitu Deklarasi Kemitraan, Kemitraan Komprehensif, dan Belt Road Initiative. Kerja sama yang dinaungi oleh ketiga wadah kerja sama tersebut terbukti menghasilkan banyak pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di antaranya Tol Cisumdawu, Tol Solo-Kertosono, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Jembatan Suramadu, dan yang terbaru adalah proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Dalam penelitian ini peneliti juga membahas efek tidak langsung yang dapat mengganggu infrastruktur.¹⁷

Artikel selanjutnya berjudul “The Impact of Foreign Direct Investment, Private Investment, Government Expenditure, and Labor on Economic Growth in Indonesia” karya Nur Annisa, Abd Jamal and Sofyan Syahnur ini membahas

¹⁷ Adis Zakiyya and Chandra Purnama, “Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Tahun 2010-2018,” *Padjajaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364>.

hubungan antara Foreign Direct Investment (FDI), investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi dinamika ekonomi nasional. FDI dianggap sebagai elemen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena membawa modal, teknologi, serta transfer pengetahuan ke dalam negeri. Selain itu, investasi swasta memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong efisiensi produksi. Namun, artikel ini juga menyoroti pentingnya peran pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur dan sektor publik sebagai faktor pendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Di sisi lain, tenaga kerja menjadi faktor utama dalam mendukung produktivitas nasional, namun kualitas dan kapasitas tenaga kerja masih menjadi tantangan dalam optimalisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDI dan investasi swasta memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun efeknya bergantung pada stabilitas ekonomi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi. Sementara itu, pengeluaran pemerintah juga berdampak positif, terutama dalam sektor-sektor yang mendorong efisiensi dan daya saing industri. Faktor tenaga kerja, meskipun berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, masih memiliki keterbatasan dalam hal produktivitas dan keahlian tenaga kerja. Artikel ini merekomendasikan kebijakan yang lebih strategis dalam menarik investasi asing dan swasta, peningkatan efektivitas belanja pemerintah, serta program pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Artikel ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.¹⁸

Artikel berikutnya, “The role of FDI in structural transformation in Morocco (1995-2022)” karya Ahmed Ait Bari dan Mustapha Amzil ini membahas bagaimana *Foreign Direct Investment* (FDI) telah memainkan peran kunci dalam transformasi struktural ekonomi Maroko dari tahun 1995 hingga 2022. Dalam periode ini, Maroko telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur ekonominya, beralih dari sektor pertanian yang dominan ke sektor industri dan jasa yang lebih modern. FDI telah menjadi faktor pendorong utama dalam perubahan ini, terutama dalam industri manufaktur, energi terbarukan, dan sektor teknologi. Investasi asing yang masuk ke Maroko dipicu oleh berbagai reformasi kebijakan pro-investasi, seperti peningkatan infrastruktur, perbaikan iklim bisnis, serta perjanjian perdagangan internasional yang membuka akses bagi perusahaan multinasional. Artikel ini juga menyoroti peran pemerintah dalam menarik FDI melalui kebijakan insentif pajak, zona ekonomi khusus, dan kemitraan strategis dengan investor asing untuk meningkatkan daya saing global Maroko.

Dalam analisisnya, artikel ini menunjukkan bahwa FDI telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Maroko, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Namun, artikel ini juga

¹⁸ Omoniyi Benjamin Badeji and Omobitan Olufunsho Abayomi, “The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Nigeria,” *International Research Journal of Finance and Economics* 73, no. 1 (2011): 133–43, <https://doi.org/10.22610/imbr.v7i4.1166>.

menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam transformasi struktural ini, seperti ketimpangan dalam distribusi manfaat FDI antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta ketergantungan pada perusahaan asing tanpa adanya peningkatan signifikan dalam industri lokal. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih terfokus pada penguatan keterkaitan antara investasi asing dan industri domestik, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, serta strategi untuk memastikan bahwa FDI tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi Maroko dalam jangka panjang.¹⁹

1.7 Kerangka Konseptual

Liberalisme Institusionalis

Liberalis Institusionalis atau Neoliberalis Institusionalis dipahami sebagai salah satu turunan dari teori Liberalisme tradisional yang disesuaikan dengan realitas politik internasional. Robert O. Keohane dalam bukunya yang berjudul *“International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory”* menjelaskan Liberalisme Institusionalis atau Neoliberalisme Institusionalisme sebagai pendekatan dalam Hubungan internasional yang berfokus bahwa institusi internasional memiliki peran dalam kerja sama antarnegara meskipun dalam sistem internasional yang anarki. Teori ini dapat di mengerti sebagai teori yang mencoba menjelaskan kerja sama antar negara tetap terjadi di

¹⁹ Ahmed Ait Bari and Mustapha Amzil, “The Role of FDI in Structural Transformation in Morocco (1995-2022),” *International Journal of Social Sciences Perspectives* 12, no. 2 (2023): 73–86, <https://doi.org/10.33094/ijssp.v12i2.1117>.

tengah sistem internasional yang anarki. Beriringan dengan realisme, liberalis institusionalis juga menganggap negara sebagai aktor utama dalam dunia Hubungan Internasional yang memiliki kedaulatan dan berhak mencapai kepentingan nasional masing-masing. Teori ini juga menyetujui adanya sistem internasional yang bersifat anarki yang menjelaskan ketiadaan pemegang otoritas tertinggi yang mampu mengatur atau membatasi interaksi antar negara. bersamaan dengan pandangannya terhadap negara sebagai aktor utama, liberalis institusionalis juga menganggap negara sebagai aktor yang rasional dalam memaksimalkan pencapaian kepentingan masing-masing.²⁰

Meskipun setuju dengan pendapat realisme mengenai pentingnya negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, liberalis institusionalis lebih optimis dengan peluang kerja sama antar negara dibanding dengan para realis. Liberalis institusionalis percaya bahwa dalam sistem internasional yang anarki pun kerja sama dapat dilakukan, berlandaskan kepentingan bersama yang kuat dan adanya peranan dari institusi yang tepat dalam memfasilitasi kerja sama tersebut. Sejalan dengan itu liberalis institusionalis juga menekankan peran penting yang dimiliki oleh institusi internasional dan juga rezim internasional. Karena dengan keberadaan institusi-institusi ini dapat menyediakan wadah atau kerangka untuk kerja sama bagi kedua negara, membantu menciptakan norma-norma yang

²⁰ Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power*, 1989.

diharapkan dapat menertibkan perilaku negara hingga dapat memperkecil ketidakpastian.²¹

Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa kerja sama antara dua negara juga dapat dilandasi kepentingan bersama, kepentingan bersama tentunya diharapkan dapat membawa manfaat bersama (*mutual gains*) karena ada beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai oleh suatu negara tanpa melakukan kerja sama. Teori liberalis institusionalis ini juga setuju dengan adanya kekuatan hegemon yang memiliki peran dalam pemeliharaan institusi internasional. Tetapi, institusi internasional juga tetap berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya tanpa bergantung pada negara hegemon atau dominan yang berkuasa. Karena optimisnya akan kerja sama antara negara dalam mencapai kepentingan bersama untuk mewujudkan *mutual gains* liberalisme institusionalis menyetujui adanya hubungan saling ketergantungan di antara negara-negara yang bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Saling ketergantungan ini memberikan peluang bantuan bagi kerja sama dalam mengatasi masalah-masalah bersama.²²

Foreign Direct Investment and Development

Sejalan dengan pemikiran Keohane, Theodore H. Moran dalam bukunya *Foreign Direct Investment and Development: The New Policy Agenda for*

²¹ Mohammed Nuruzzaman, "Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001," *International Studies* 45, no. 3 (2008): 193–213, <https://doi.org/10.1177/002088170904500302>.

²² Nuruzzaman.

Developing Countries and Economic in Transtion (1998) yang berfokus pada kebijakan negara tuan rumah yang berupaya mengelola kegiatan investor asing, khususnya gerakan promosi investasi, persyaratan konten domestik, dan kebutuhan kinerja ekspor. Buku ini sesuai dengan asumsi dasar liberalis institusionalis yang dijelaskan oleh Keohane sebelumnya, salah satunya yaitu mempercayai negara sebagai aktor utama namun juga percaya akan peran institusi internasional serta optimis terhadap kerja sama. Buku ini menggarisbawahi peningkatan peran FDI di negara-negara berkembang dan perekonomian dalam transisi telah menjadi transformasi dalam perspektif, dari kewaspadaan kritis terhadap perusahaan multinasional hingga tidak kritis dalam melibatkan perusahaan asing dalam proses pembangunan. Moran menjelaskan FDI sebagai bentuk investasi berjangka panjang yang diberikan oleh pihak luar negeri termasuk perusahaan multinasional, pada pola investasi ini pihak pemberi investasi memiliki kekuasaan atau pengaruh yang cukup kuat terhadap sektor atau bisnis yang diberikan pendanaan. Dalam buku seri pertama ini Moran menyebutkan beberapa kebijakan utama yang memiliki manfaat langsung dalam proses pengelolaan FDI.

Pertama, *host country* atau negara tuan rumah atau negara penerima FDI harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif ini meliputi perbaikan kebijakan yang transparan serta stabil. Kebijakan yang ada juga harus bisa memberikan serta melindungi hak kepemilikan dan perlindungan para investor asing. Perbaikan sistem birokrasi

yang dapat memudahkan alur masuknya FDI juga perlu dilakukan oleh *host country*. Kedua, negara tuan rumah harus mampu mengarahkan pendanaan FDI ke sektor yang lebih strategis dan memiliki dampak positif untuk pertumbuhan perekonomian domestik dalam jangka panjang. Berdasarkan tulisannya, Moran berpendapat bahwa FDI Di sektor manufaktur dan teknologi seharusnya menjadi sektor yang diutamakan daripada sektor ekstraktif. Berikutnya, di buku ini Moran juga menjelaskan bahwa *host country* dapat mendorong perusahaan asing yang berinvestasi untuk melibatkan perusahaan domestik atau para tenaga kerja domestik, yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effects* berupa penciptaan lapangan kerja dan berjalannya aliran modal. Dalam prosesnya keterlibatan pihak lokal juga dapat dilakukan dengan adanya transfer teknologi dan peningkatan keterampilan para tenaga kerja lokal melalui berbagai pelatihan kompetensi. Di generasi pertama bukunya ini Moran juga membahas tentang pengelolaan risiko FDI dan mengagaskan harus adanya dampak sosial yang positif yang diterima oleh negara penerima FDI sehingga keberlanjutan di negara tersebut dapat diwujudkan.²³ Namun, manfaat langsung tidak cukup membawa suatu negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Negara perlu menargetkan manfaat struktural untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

²³ Theodore H. Moran, *Foreign Direct Investment And Developmnts: The New Policy Agenda for Developing Countries and Economic Transition* (Institute for International Economics Washington, 1998).

Di tahun 2011 Moran kembali meluncurkan generasi kedua dari buku ini dengan judul *Foreign Direct Investment and Development: Launching a Second Generation of Policy Research* (2011). Berbeda dengan buku di generasi sebelumnya yang berfokus pada manfaat langsung yang dapat di dapatkan oleh *host country* dalam mengelola FDI. Di generasi kedua ini Moran menekankan pembentukan kebijakan yang dapat memanfaatkan FDI yang mengarah ke perubahan struktural negara penerima dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam buku generasi kedua ini Moran membahas indikator penentu dampak yang dihasilkan FDI lebih mengarah ke positif atau negatif di setiap bidang dapat dilihat melalui kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tuan rumah negara berkembang, diperkuat oleh otoritas negara maju dan lembaga bantuan keuangan multilateral, organisasi buruh LSM dan kelompok masyarakat sipil serta komunitas tanggung jawab sosial perusahaan khususnya para investor itu sendiri.²⁴

Moran konsisten menunjukkan peran kompleks yang dimiliki oleh *host country* yang umumnya berstatus negara berkembang dalam pembahasan di buku seri keduanya ini. Yang membahas kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara berkembang sebagai *host country* secara lebih kompleks dan mendalam. Manfaat yang didapatkan pun tidak lagi sekedar manfaat langsung, yang di definisikan oleh Moran sebagai manfaat ekonomi yang terlihat langsung seperti pembukaan

²⁴ Theodore H. Moran, *Foreign Direct Investment and Developments: Launching a Second Generation of Policy Research* (Peterson institute for Intrnational Economics, 2011).

lapangan pekerjaan, transfer teknologi, peningkatan ekspor, dan peningkatan pendapatan. Moran menargetkan manfaat struktural yang mendukung keberlanjutan. Manfaat struktural dijelaskan oleh Moran sebagai manfaat jangka panjang yang memperbaiki struktur ekonomi lokal dan berkontribusi pada keberlanjutan yang dapat diwujudkan melalui:

1. *Transpararency of Payment*

Transpararency of Payment atau transparansi pembayaran dijelaskan sebagai sistem pengelolaan aliran investasi asing yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Negara berkembang yang berperan sebagai negara penerima investasi perlu untuk memanfaatkan secara maksimal penguatan kebijakan yang menyangkut *transparency of payments* atau transparansi pembayaran dan transparansi aliran pendapatan yang dapat diartikan sebagai kebijakan anti korupsi yang berupa kebijakan fiskal. Melalui sistem ini *host country* dapat mengurangi ancaman penyelewengan atau penyalahgunaan dana investasi asing yang masuk.

Pertama, *transparency of payment* dapat diwujudkan melalui pembentukan kebijakan kuat yang dapat berbentuk undang-undang yang menentang korupsi. Secara khusus pada bidang ekstraksi membentuk peraturan yang menyangkal eksploitasi sumber daya alam dan mendukung penyediaan infrastruktur. Selanjutnya, transparansi juga dapat dilakukan dengan pembuatan kebijakan oleh *host country* yang mengharuskan keterbukaan aliran investasi yang dapat dilihat dan diakses publik untuk

menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Di buku ini Moran juga menyebutkan pentingnya *host country* untuk mengimplementasikan kebijakan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tentang korupsi yang tercantum dalam konvensi *anti-bribery* atau anti korupsi yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang, transparan, dan memastikan kualitas kebijakan ekonomi di dunia internasional dijalankan dengan adil.²⁵

Pengimplementasian konvensi ini bertujuan untuk menyamakan landasan negara-negara melalui rekomendasi berupa kebijakan anti suap bagi pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional, pengembangan kerja sama antara pembangunan dalam pengelolaan risiko korupsi, dan rekomendasi kebijakan pajak dalam memerangi penyuapan pejabat publik asing dalam proses transaksi bisnis internasional.²⁶ Meskipun negara pemberi bukan merupakan negara OECD namun kepatuhannya terhadap kebijakan anti korupsi dari OECD harus dipastikan. Penguatan kebijakan fiskal yang meliputi pengukuran pajak FDI juga diperlukan untuk memaksimalkan manfaat yang diterima *host country*. Di sektor ekstraktif secara khusus dapat di lakukan penguatan dan perluasan standar *Extractive Industries Transparency Initiative* atau EITI yang

²⁵ KPK, “KPK Gelar FGD, Persiapkan Initial Memorandum OECD Bidang Antikorupsi,” 23 November 2024, accessed January 3, 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-gelar-fgd-persiapkan-initial-memorandum-oecd-bidang-antikorupsi>.

²⁶ Deborah Leipziger, “The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,” *The Corporate Responsibility Code Book: Third Edition*, 2015, 307–29, https://doi.org/10.9774/gleaf.9781783530670_18.

berperan sebagai acuan global tata kelola sumber daya minyak, gas, dan mineral yang baik sembari berusaha mengatasi isu-isu tata kelola utama di sektor ekstraktif.

2. Perubahan Pola Ekonomi

Perbaikan pola ekonomi yang dimaksud adalah perbaikan pola ekonomi yang awalnya berbasis ekonomi tradisional ke pola ekonomi yang modern. Ekonomi tradisional diartikan sebagai sistem ekonomi yang mengacu pada nilai, norma, dan tradisi budaya masyarakat lokal yang pembagian kerjanya terbatas dan produksi hanya dilakukan sesuai kebutuhan.²⁷ Sedangkan ekonomi modern dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan teknologi, efisiensi produksi, pasar global dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhannya yang fokusnya di dominasi oleh sektor-sektor jasa, manufaktur, dan digital.²⁸ Dari beberapa sektor investasi yang dijelaskan dalam buku secara khusus sektor manufaktur, menjadi tujuan utama masuknya FDI.

Host country harus memaksimalkan manfaat dengan menggerakkan kebijakan yang mampu menjadikan sumber daya manusia yang ada setidaknya menjadi tenaga kerja aktif. Selanjutnya, untuk memperbaiki pola perekonomian negara perlu dijalankan proses ekspor yang mengarah ke

²⁷ Humaidi, "Ekonomi Tradisional Dan Perubahan Sosial," *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3, no. 1 (2024): 110–23, <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.1.110-123>.

²⁸ Muallif, "Ekonomi Modern: Pengertian, Karakteristik, Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia," Universitas Islam An-Nur Lampung, 2024, <https://an-nur.ac.id/ekonomi-modern/>

pertumbuhan dan kebijakan yang menggerakkan *host country* untuk membuka jalur jaringan pemasok produk manufaktur berketerampilan tinggi. Dalam prosesnya diharapkan akan adanya *multiplier effects* yang berupa transfer teknologi dan pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal yang lebih tinggi.

3. Perbaikan Iklim Bisnis Lokal

Perbaikan iklim bisnis lokal dapat diartikan sebagai usaha penguatan kesehatan dan vitalitas perusahaan lokal. Perbaikan iklim bisnis lokal dilakukan demi menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dapat dicapai melalui kebijakan fiskal *host country* mengenai perlakuan regulasi yang ramah untuk bisnis lokal serta layanan infrastruktur yang memadai. Pembiayaan impor bebas pajak yang setara dan adil seperti yang didapatkan oleh investor asing juga menjadi salah satu cara. Menurut Moran, keberhasilan dalam meningkatkan iklim bisnis lokal dapat meningkatkan prospek bagi perusahaan lokal untuk memegang peran sebagai produsen bagi para investor multinasional. Bagi negara berkembang yang merupakan *host country* untuk memaksimalkan *foreign direct investment* yang masuk demi memperkuat iklim bisnis lokal juga dapat dilakukan melalui pemantauan produk domestik dan bekerja sama dengan

perusahaan asing atau yang biasanya menjadi pihak pemberi FDI untuk membentuk *joint venturer* atau kerja sama gabungan antara kedua pihak.²⁹

4. Promosi Investasi

Promosi investasi di sini dapat diartikan sebagai usaha *host country* dalam memasarkan negaranya sebagai wilayah yang baru dan unik untuk para investor berinvestasi. Dalam prosesnya promosi juga dapat dilakukan oleh lembaga yang bertugas mempromosikan investasi secara pro aktif yang memasarkan negara sebagai lokasi FDI terbaru. Promosi diperlukan untuk meningkatkan minat investor dan mengarahkan investasi yang masuk ke sektor prioritas *host country*. Promosi yang maksimal harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga lebih meyakinkan bagi pemberi FDI untuk memilih suatu negara sebagai *host country* atau negara penerima FDI. *Host country* juga dapat mempromosikan vendor domestik dan mengeksplor serta mengidentifikasi secara aktif *supplier* lokal demi meningkatkan perputaran roda perekonomian lokal secara maksimal. Promosi investasi juga dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan investasi dan kebijakan pemotongan pajak investasi.

Dalam penelitian ini, konsep yang dijelaskan dalam buku Moran tersebut akan digunakan sebagai landasan konsep. Yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang bertindak

²⁹ Theodore H. Moran, *Foreign Direct Investment and Developments: Launching a Second Generation of Policy Research*.

sebagai perencana utama, regulator, dan fasilitator yang bertugas memastikan pengelolaan FDI berjalan dengan maksimal serta searah dengan arah pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan teori dan analisis data yang mendalam. Pendekatan dengan metode ini menyelaraskan antara teori tertulis yang ada dengan sumber data yang dianalisis atau dapat juga berdasarkan lisan dari objek yang dapat diamati dalam proses pengumpulan data. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami serta menjelaskan pemahaman pertama mengenai suatu isu atau fenomena yang sebelumnya belum terlalu banyak diketahui. Metode ini umumnya digunakan apabila data yang digunakan dalam penelitian mengenai suatu topik yang masih dalam proses pembelajaran terbatas atau bahkan belum tersedia.³⁰

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian, diperlukan batasan- batasan yang jelas. Batasan penelitian diperlukan agar ruang

³⁰ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Buku Penelitian Kualitatif*, 2021.

lingkup penelitian tetap dan tidak melenceng dari pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan.³¹ Terdapat dua batasan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini. Batasan pertama adalah batasan waktu yaitu mulai dari 2015-2024, 2015 dipilih karena bertepatan dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung keberlanjutan dengan teknologi terbaru hasil pendanaan FDI Tiongkok dan 2024 sebagai batas akhir penelitian akan memberikan kerangka waktu yang komprehensif, relevan secara politik dan data, serta praktis untuk melakukan analisis mendalam tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait FDI Tiongkok di sektor transportasi berkelanjutan. Batasan kedua batasan permasalahan yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui pengelolaan *pendanaan Foreign Direct Investment* dari Tiongkok.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian, konsep unit analisis merujuk pada objek yang hendak dipahami dan dianalisis. Sementara itu unit eksplanasi mengarah pada unit yang memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku dari unit analisis tersebut. Selanjutnya, level atau tingkat analisis yang menjelaskan posisi atau kedudukan dari pada unit yang dijadikan objek penelitian, baik di level individu, kelompok, organisasi, atau negara. Tingkatan dalam

³¹ Jo Mackiewicz, *A Mixed-Method Approach, Writing Center Talk over Time*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.

analisis ini menjelaskan posisi cakupan area yang akan di teliti oleh peneliti agar tidak terlalu meluar dan diharapkan akan menjadikan penulis mampu memberikan penjelasan yang detail.³²

Dalam penelitian ini, unit analisis yang dijadikan fokus penelitian adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia selaku objek yang dianalisis dengan pemerintah sebagai aktor utama sedangkan unit eksplanasi yang dipertimbangkan adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masuknya *Foreign Direct Investment* khususnya dari Tiongkok dan kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini akan berfokus pada tingkat analisis *state level* atau tingkat negara. Tingkat negara diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada kebijakan domestik suatu negara yang dapat memberikan pengaruh pada posisinya di ekonomi global.³³ Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia sebagai aktor utama yang mengatur *Foreign Direct Investment* yang datang dari Tiongkok pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer menurut Michael Quinn Patton, merupakan data

³² Mohtar Mas' oed, "Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis Dan Teorisasi," n.d.

³³ Bradford Dillman David N. Balaam, *Introduction to International Political Economy*, n.d.

yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Patton menekankan peran penting yang dimiliki data primer dalam penelitian kualitatif. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi grup fokus, dan analisis dokumen. Data primer dianggap penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai topik penelitian secara mendalam, memberikan perspektif yang unik, dan mengembangkan interpretasi yang lebih kredibel.³⁴ Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara pihak Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM koordinator FDI sektor pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Wawancara dilakukan bersama serta analisis dokumen kebijakan serta dokumen informasi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Sementara itu, data sekunder sendiri merupakan data yang teknik pengumpulannya diperoleh dari sumber tidak langsung seperti laporan, buku, buku elektronik, artikel penelitian, jurnal ilmiah, maupun karya ilmiah lainnya.³⁵ Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan data yang berasal dari jurnal- jurnal, artikel, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti.³⁶ Sumber data yang dipakai dalam penelitian yaitu buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang, kondisi Indonesia

³⁴ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd Ed.)*, *Evaluation Journal of Australasia*, vol. 3, 2003, <https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213>.

³⁵ Mackiewicz, *A Mixed-Method Approach*.

³⁶ Mackiewicz.

dan kebutuhannya akan pembangunan infrastruktur, pengaruh FDI pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peran intervensi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, juga bahan bacaan yang membahas konsep FDI *and development* dalam Hubungan Internasional.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab pertanyaan pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman. Analisis kualitatif merujuk pada data- data yang berwujud kata-kata dan tidak terdiri dari rangkaian angka. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai cara yaitu, observasi, wawancara, yang selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, dan penulisan yang disusun dalam teks.³⁷ Analisis menurut Miles dan Huberman (1994) dibagi ke dalam tiga alur yang meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam proses penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.³⁸ Melalui proses reduksi data, data dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, dapat

³⁷ A. Michael Matthew B. Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Sage Publications, 1994).

³⁸ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2020.

melalui uraian ringkas yang mengklasifikasikan dalam satu pola yang lebih luas. Dalam proses reduksi data peneliti akan berfokus pada tujuan penelitian dan temuannya. Pada tahap ini, data dari wawancara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi dikelompokkan berdasarkan penjelasan dari konsep *FDI and Development* karya Theodore Moran untuk membantu peneliti mengelompokkan data yang telah di dapat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat ditarik kesimpulannya dan menentukan tindakan selanjutnya. Penyajian data yang paling sering ditemui dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif. Selain teks narasi penyajian data agar ringkas dan mudah dipahami juga dapat dilakukan melalui tabel dan diagram. Setelah direduksi data dapat disajikan melalui salah satu teknik penyajian data tersebut.³⁹ Dalam penelitian ini hasil dari wawancara Kementerian Investasi dan dokumen yang telah direduksi akan di ringkas menjadi bentuk tabel yang dikelompokkan sesuai topik.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

³⁹ Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana.

Setelah dua langkah sebelumnya, Miles dan Huberman menentukan penarikan kesimpulan sebagai langkah ketiga. Dalam proses penarikan kesimpulan pertama, simpulan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila bukti-bukti yang dibutuhkan tidak ditemukan dalam tahap pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan awal ditemukan bukti-bukti yang valid saat pengumpulan data di lapangan maka simpulan yang di simpulkan menjadi kesimpulan yang kredibel. Verifikasi data dapat dilakukan melalui triangulasi data yang membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan laporan yang ada. Selain itu dapat dilakukan juga verifikasi dengan memeriksa kesesuaian dengan penelitian terdahulu.⁴⁰ Dalam penelitian ini kesimpulan dapat ditarik melalui triangulasi data yang dicapai atas perbandingan hasil wawancara Kementerian Investasi dengan dokumen penelitian dan kebijakan dan laporan mengenai FDI Tiongkok di Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang dari penelitian, meninjau rumusan masalah, juga pertanyaan penelitian, menentukan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, memberikan penjelasan tentang studi pustaka, menjelaskan

⁴⁰ Matthew B. Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*.

kerangka konseptual yang dipakai dalam penelitian, serta menentukan metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR TRANSPORTASI YANG Mendukung Keberlanjutan

Bab ini akan membahas mengenai kebutuhan Indonesia akan infrastruktur yang memadai dan bersifat berkelanjutan. Dan bagaimana infrastruktur dapat membantu menggerakkan pertumbuhan perekonomian serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada bab ini juga akan membahas pentingnya melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dianggap sebagai langkah visioner bagi pemerintah Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB III FOREIGN DIRECT INVESTMENT DARI TIONGKOK DI INDONESIA

Dalam bab ini akan memahami pola interaksi kedua negara dan bentuk investasi asing apa saja yang masuk dari Tiongkok di Indonesia. Secara khusus juga akan dibahas masuknya *Foreign Direct Investment* yang berasal dari Tiongkok pada pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Akan dibahas dan dianalisis tentang dampak pembangunan yang di danai FDI sebagai bentuk masuknya investasi asing dari Tiongkok di Indonesia. Identifikasi akan dilakukan pada proyek- proyek yang mendapatkan FDI melalui inisiasi *Belt Road Initiative*.

Pada bab ini juga akan dibahas mengenai tantangan dan peluang pada pengimplementasian proyek yang didasari pendanaannya oleh FDI dari Tiongkok.

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGELOLAAN FDI DARI TIONGKOK UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Setelah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai kebutuhan Indonesia akan infrastruktur berkelanjutan dan FDI dalam prosesnya, juga mengenai sektor-sektor infrastruktur yang berhasil dibangun berkat pendanaan *Foreign Direct Investment* yang masuk. Maka akan dibahas pada bagian ini mengenai kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola FDI khususnya dari Tiongkok demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada bagian ini akan dianalisis kebijakan pengelolaan FDI dari Tiongkok yang dilakukan pemerintah Indonesia meliputi kebijakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan *Transparency of Payments*, perubahan pola ekonomi, promosi investasi, dan perbaikan iklim bisnis lokal yang mengarah pada penerapan *framework Environment, Social, and Governance* dalam pembangunan infrastruktur, dan lainnya.

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab terakhir ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan akan mencakup inti sari dari pembahasan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya yang akan di hasilkan dari penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini juga akan terkandung saran ataupun

rekomendasi untuk penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya sehingga penelitian ini diharapkan akan terus berkembang.

